



Penguatan Literasi dan Kesadaran Partisipasi Politik Mahasiswa Perempuan sebagai Warganegara Demokratis

Strengthening Political Literacy and Awareness of Female University Students as Democratic Citizens

Robyan Endruw Bafadal^{1*}, Siti Hidayatul Jumaah², M. Dirangse Samudra³, Baiq Dewi Kamariani⁴

^{1,2,3}Administrasi Publik, Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Selong, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hidayatulj929@yahoo.com

Article History:

Naskah Masuk: 26 November 2025;

Revisi: 24 Desember 2025;

Diterima: 21 Januari 2026;

Tersedia: 27 Januari 2026:

Keywords: Political participation; political literacy; female university students; community service; civic education

Abstract: Low levels of political literacy and political participation awareness among female university students remain a challenge for strengthening democracy at the local level. This condition is also found among female students in East Lombok, who tend to perceive political participation narrowly and lack the skills and confidence to engage actively as citizens. This community service program aims to enhance political literacy, participatory awareness, and the capacity of female students to understand and practice political participation in a critical and responsible manner. The program was implemented at the Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong using a community organizing approach integrated into the academic learning process. The methods included participatory discussions, mentoring, simulations, and critical reflection, positioning female students as active subjects throughout the activities. The results indicate an improvement in participants' understanding of the meaning and forms of political participation, increased confidence in expressing opinions, and the emergence of new awareness regarding their roles as democratic citizens. In addition, a female student discussion group was formed as a space for collective learning and an early platform for local leadership. This program highlights the role of higher education institutions in promoting social transformation and strengthening women's political participation at the local level.

Abstrak

Rendahnya literasi dan kesadaran partisipasi politik mahasiswa perempuan masih menjadi tantangan dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal. Kondisi ini juga ditemukan pada mahasiswa perempuan di Lombok Timur yang umumnya memaknai partisipasi politik secara terbatas dan belum memiliki keterampilan serta kepercayaan diri untuk terlibat aktif sebagai warga negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi politik, kesadaran partisipatif, dan kapasitas mahasiswa perempuan dalam memahami serta menjalankan partisipasi politik secara kritis dan bertanggung jawab. Pengabdian dilaksanakan di Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong dengan pendekatan pengorganisasian komunitas yang terintegrasi dengan proses perkuliahan. Metode yang digunakan meliputi diskusi partisipatif, pendampingan, simulasi, dan refleksi kritis yang menempatkan mahasiswa perempuan sebagai subjek aktif dalam kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman tentang makna dan bentuk partisipasi politik, tumbuhnya keberanian menyampaikan pendapat, serta munculnya kesadaran baru mengenai peran mahasiswa perempuan sebagai warga negara demokratis. Selain itu, terbentuk kelompok diskusi mahasiswa perempuan sebagai ruang belajar kolektif dan embrio kepemimpinan lokal. Kegiatan ini menegaskan peran perguruan tinggi dalam mendorong transformasi sosial dan penguatan partisipasi politik perempuan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Partisipasi politik; literasi politik; mahasiswa perempuan; pengabdian masyarakat; pendidikan kewarganegaraan

1. PENDAHULUAN

Partisipasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai keikutsertaan atau peran serta seseorang dalam suatu kegiatan, sedangkan politik dipahami sebagai pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan ketatanegaraan, sistem pemerintahan, kebijakan publik, serta cara bertindak dalam pengelolaan urusan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai keterlibatan warga negara dalam aktivitas yang berkaitan dengan proses politik dan pemerintahan sebagai perwujudan peran mereka dalam kehidupan demokratis.

Rush dan Althoff mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa yang bertujuan untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, termasuk dalam menentukan pemimpin pemerintahan (Damsar, 2010). Pengertian ini diperluas oleh Huntington dan Nelson yang memandang partisipasi politik sebagai tindakan warga negara, baik secara individual maupun kolektif, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dengan karakteristik yang beragam, mulai dari terorganisasi hingga spontan, legal maupun ilegal, damai maupun dengan kekerasan (Budiardjo, 2008).

Dalam praktiknya, tidak seluruh warga negara menunjukkan tingkat partisipasi politik yang aktif. Sebagian masyarakat masih bersikap apatis dan kurang memberikan perhatian terhadap isu politik dan kebangsaan, yang berimplikasi pada tidak tersalurkannya aspirasi publik secara optimal (Andiraharja, 2020). Partisipasi politik secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk konvensional dan non-konvensional, di mana variasi bentuk dan intensitas partisipasi tersebut dapat digunakan sebagai indikator stabilitas sistem politik, kualitas kehidupan demokrasi, serta tingkat kepuasan atau ketidakpuasan warga negara terhadap kinerja pemerintah (Almond, 2006).

Tabel 1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
1. Pemberian suara (<i>voting</i>) 2. Diskusi Politik 3. Kegiatan Kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam Kelompok Kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	1. Pengajuan petisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindak Kekerasan Politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) 7. Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Gabriel A. Almond. (2006). *Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik*.

Pemberian suara (*voting*) merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang paling populer dan banyak dipraktikkan. Bahkan di negara totaliter, pemilihan umum tetap diselenggarakan, meskipun berfungsi sebagai alat legitimasi bagi elite penguasa, di mana penolakan memilih sering dimaknai sebagai bentuk protes pasif. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme partisipasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan serta sebagai sarana sirkulasi elite melalui mekanisme ganjaran dan hukuman berdasarkan kinerja politik (Almond, 2006).

Namun demikian, praktik partisipasi politik di Indonesia masih cenderung terbatas pada aktivitas pemberian suara dalam pemilihan umum, khususnya di kalangan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik sejatinya memiliki arti strategis bagi pembangunan yang berkeadilan gender, karena memungkinkan perempuan berperan sebagai pengambil keputusan yang merepresentasikan kepentingannya. Akan tetapi, partisipasi perempuan masih dominan pada tataran elektoral semata, sementara peran substantif dalam proses politik dan pengambilan kebijakan belum optimal, meskipun perempuan secara normatif diposisikan sebagai mitra sejajar laki-laki (Priandi & Roisah, 2019).

Secara normatif, penguatan keterlibatan perempuan dalam politik telah diakomodasi melalui berbagai regulasi yang mengatur kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif dan kepengurusan partai politik. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, di antaranya faktor agama dan budaya patriarkal yang membatasi ruang kepemimpinan perempuan serta praktik partai politik yang menjadikan perempuan sekadar pemenuhan syarat administratif. Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif dan belum optimalnya substansi keterwakilan perempuan dalam politik (Kiftiyah, 2019; Widiyaningrum, 2020).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, partisipasi politik, khususnya di kalangan perempuan, masih cenderung terbatas pada aktivitas elektoral berupa pemberian suara dalam pemilihan umum dan belum berkembang ke bentuk partisipasi yang lebih substantif. Kondisi ini tidak terlepas dari lemahnya literasi politik, keterbatasan pemahaman mengenai hak dan peran warga negara, serta kuatnya hambatan struktural dan kultural yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam ruang politik. Realitas tersebut juga tercermin pada kalangan mahasiswa perempuan di Lombok Timur yang seharusnya menjadi kelompok strategis dalam penguatan demokrasi partisipatoris.

Mahasiswa perempuan di Lombok Timur masih menghadapi tantangan dalam mengakses literasi politik dan menjalankan peran politik secara aktif. Banyak studi menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan tentang sistem pemerintahan, mekanisme partisipasi, serta keterbatasan kemampuan berpikir kritis menjadi kendala utama yang mendorong sikap apatis atau pasif (Kusnadi & Sunarso, 2019). Kendala ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan kultural. Norma sosial yang mengasosiasikan ranah politik dengan ruang maskulin memperkuat stereotip bahwa perempuan kurang layak terlibat dalam urusan publik (Sulastri, 2019). Dampaknya, meskipun banyak kampus di Indonesia memiliki organisasi mahasiswa dan forum diskusi, keterlibatan aktif mahasiswa perempuan dalam forum-forum politik akademik maupun kampanye isu publik relatif rendah.

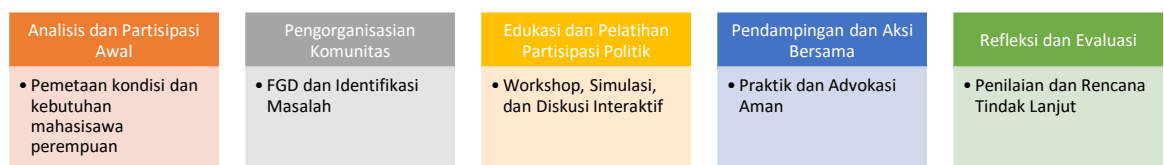
Di sisi kebijakan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam ranah publik, seperti ketentuan kuota perempuan 30% pada daftar calon legislatif dan pengurus partai politik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). Di level pendidikan tinggi, program pemberdayaan mahasiswa perempuan dan penguatan literasi politik mulai diinisiasi oleh sejumlah perguruan tinggi, termasuk melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kuliah umum, dan kegiatan diskusi lintas disiplin. Namun, di banyak kampus, inisiatif tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis ke dalam kurikulum maupun mekanisme belajar-mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan intervensi yang lebih terencana dan berkelanjutan untuk menghadirkan literasi politik yang responsif gender sekaligus meningkatkan partisipasi politik mahasiswa perempuan di kampus.

Berdasarkan analisis situasi dan kondisi mahasiswa di Lombok Timur, dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa perempuan belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan partisipasi politik secara sadar, aman, dan bertanggung jawab. Beberapa permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi antara lain rendahnya pemahaman mengenai makna partisipasi politik, minimnya kemampuan dalam menyiapkan bahan dan referensi untuk berpartisipasi secara kritis, terbatasnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan sebagai warga negara, serta kurangnya pengetahuan dasar mengenai politik dan pemerintahan secara umum.

Berdasarkan analisis situasi dan kondisi mahasiswa di Lombok Timur, dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa perempuan belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan partisipasi politik secara sadar, aman, dan bertanggung jawab. Beberapa permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi antara lain rendahnya pemahaman mengenai makna partisipasi politik, minimnya kemampuan dalam menyiapkan bahan dan referensi untuk berpartisipasi secara kritis, terbatasnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan sebagai warga negara, serta kurangnya pengetahuan dasar mengenai politik dan pemerintahan secara umum.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang sebagai upaya intervensi edukatif untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi mahasiswa perempuan di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan ini meliputi: (1) bagaimana memotivasi dan meningkatkan kesadaran mahasiswa perempuan terhadap pentingnya partisipasi politik sebagai warganegara demokratis; (2) bagaimana melatih dan mendampingi mahasiswa perempuan agar mampu melindungi diri dan memahami aspek keamanan serta etika dalam berpartisipasi politik; serta (3) bagaimana memfasilitasi mahasiswa perempuan dalam memahami pelaksanaan politik dan pemerintahan secara umum sebagai bekal partisipasi yang bermakna dan berkelanjutan.

2. METODE



Gambar 1. Diagram Metode Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian komunitas (*community organizing*) yang dipadukan dengan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini menempatkan mahasiswa perempuan sebagai subjek utama pengabdian yang terlibat secara aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi dan evaluasi. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk tidak hanya meningkatkan pengetahuan mahasiswa perempuan tentang partisipasi politik, tetapi juga membangun kesadaran kritis, rasa aman, serta keterampilan praktis dalam berpartisipasi sebagai warganegara demokratis.

Subjek pengabdian adalah mahasiswa perempuan yang berasal dari berbagai program studi di Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, dengan lokasi pelaksanaan kegiatan berpusat di lingkungan kampus. Kampus diposisikan sebagai ruang belajar dan ruang aman (*safe space*) bagi mahasiswa perempuan untuk mendiskusikan isu politik dan pemerintahan, berbagi pengalaman, serta mengembangkan pemahaman dan keterampilan partisipasi politik tanpa tekanan maupun risiko sosial yang berlebihan.

Proses perencanaan kegiatan diawali dengan pengorganisasian komunitas mahasiswa perempuan melalui diskusi awal dan forum kelompok terarah untuk memetakan tingkat pengetahuan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi dalam melakukan partisipasi politik. Pada tahap ini, mahasiswa dilibatkan secara aktif untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, bentuk partisipasi politik yang relevan, serta potensi risiko yang perlu diantisipasi. Hasil pemetaan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun agenda kegiatan pengabdian yang kontekstual dan responsif terhadap kondisi mahasiswa.

Sebagai bagian dari pendekatan PAR, kegiatan pengabdian ini dilengkapi dengan teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan mahasiswa perempuan peserta kegiatan untuk menggali tingkat literasi politik awal, persepsi terhadap politik dan partisipasi politik, pengalaman keterlibatan politik, serta hambatan psikologis, sosial, dan kultural yang memengaruhi partisipasi mereka. Wawancara juga digunakan untuk menangkap perubahan kesadaran, kepercayaan diri, dan kesiapan mahasiswa perempuan dalam memaknai politik sebagai ruang kewarganegaraan yang aman dan bermakna.

Selain wawancara, digunakan pula survei atau kuesioner sederhana yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian. Survei ini bertujuan untuk mengukur perubahan tingkat literasi politik dan kesadaran partisipasi politik mahasiswa perempuan, meliputi pemahaman mengenai hak dan kewajiban warganegara, pengetahuan tentang sistem politik dan pemerintahan, serta sikap terhadap partisipasi politik. Hasil survei digunakan sebagai data pendukung untuk melihat kecenderungan perubahan secara agregat.

Strategi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui serangkaian aktivitas edukatif dan reflektif yang bersifat partisipatif. Materi mengenai partisipasi politik, hak dan kewajiban warganegara, serta sistem politik dan pemerintahan disampaikan melalui diskusi interaktif dan studi kasus yang dekat dengan realitas mahasiswa. Selain itu, dilakukan pelatihan dan simulasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang aman dan bertanggung jawab, seperti diskusi publik, penyusunan pernyataan sikap, serta advokasi isu sosial secara etis. Seluruh proses ini didampingi oleh tim pengabdian yang berperan sebagai fasilitator dan pendamping, bukan sebagai aktor dominan.

Data tambahan diperoleh melalui observasi partisipatif, di mana tim pengabdian mengamati dinamika keterlibatan mahasiswa perempuan dalam diskusi, simulasi, dan kegiatan reflektif. Observasi difokuskan pada aspek partisipasi aktif, keberanian menyampaikan pendapat, serta pola interaksi yang mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif dan rasa aman dalam ruang belajar politik.

Tahapan akhir kegiatan difokuskan pada refleksi dan evaluasi bersama untuk menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan kesiapan mahasiswa perempuan dalam melakukan partisipasi politik. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menekankan pada proses, makna, dan perubahan sosial yang terjadi selama kegiatan pengabdian. Analisis dilakukan secara reflektif bersama mahasiswa perempuan sebagai bagian dari prinsip PAR, sehingga hasil pengabdian tidak hanya merepresentasikan sudut pandang tim pelaksana, tetapi juga pengalaman dan pembelajaran subjek dampingan. Pendekatan metodologis ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, kedalaman analisis, serta relevansi hasil pengabdian terhadap upaya penguatan literasi dan partisipasi politik mahasiswa perempuan secara berkelanjutan.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di lingkungan Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong menunjukkan dinamika pendampingan yang berkembang secara bertahap dan partisipatif. Pada tahap awal kegiatan, mahasiswa perempuan cenderung menunjukkan sikap pasif, ragu, dan berhati-hati dalam mengemukakan pandangan terkait isu politik dan pemerintahan. Politik masih dipersepsikan sebagai ranah yang jauh dari kehidupan mereka serta identik dengan konflik, risiko sosial, dan dominasi laki-laki. Kondisi ini menjadi gambaran awal rendahnya literasi politik dan kepercayaan diri mahasiswa perempuan dalam melakukan partisipasi politik.

Seiring dengan berlangsungnya proses pendampingan, dinamika interaksi mulai mengalami perubahan. Melalui diskusi kelompok terarah, forum kelas partisipatif, dan refleksi bersama, mahasiswa perempuan mulai terlibat aktif dalam mengidentifikasi persoalan publik yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti kebijakan pendidikan, isu kesehatan perempuan, serta representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Ragam kegiatan yang dilaksanakan meliputi workshop literasi politik, diskusi studi kasus, simulasi partisipasi politik yang aman, serta pendampingan dalam menyusun argumen dan pendapat berbasis data. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga melatih keterampilan teknis mahasiswa perempuan dalam berpartisipasi secara rasional, etis, dan bertanggung jawab.



Gambar 2. Kegiatan Workshop Literasi Politik



Gambar 3. Diskusi Studi Kasus dan Simulasi Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk aksi yang bersifat teknis diwujudkan melalui praktik langsung, seperti simulasi forum diskusi publik, penyusunan pernyataan sikap mahasiswa terhadap isu tertentu, serta latihan advokasi kebijakan dalam skala kampus. Dalam proses ini, mahasiswa perempuan didampingi untuk memahami batasan hukum, etika berpendapat, serta strategi perlindungan diri dalam menyampaikan aspirasi politik. Pendampingan ini menjadi penting untuk menjawab kekhawatiran mahasiswa terhadap risiko sosial maupun stigma yang sering dilekatkan pada perempuan yang aktif di ruang publik dan politik.

Hasil dari rangkaian kegiatan tersebut terlihat pada perubahan perilaku dan pola pikir mahasiswa perempuan. Mahasiswa tidak lagi memandang partisipasi politik semata sebagai pemberian suara dalam pemilihan umum, melainkan sebagai keterlibatan berkelanjutan dalam diskusi publik, penyampaian aspirasi, dan pengawasan kebijakan. Terjadi peningkatan keberanian dalam menyampaikan pendapat, kemampuan menyusun

argumen secara logis, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warganegara demokratis. Perubahan ini menunjukkan terjadinya transformasi pada level individu, khususnya dalam aspek kognitif, afektif, dan kesiapan bertindak.

Pada level komunitas, kegiatan pengabdian ini memunculkan embrio perubahan sosial berupa terbentuknya kelompok diskusi dan belajar mahasiswa perempuan yang berfungsi sebagai pranata sosial baru di lingkungan kampus. Kelompok ini menjadi ruang aman (*safe space*) untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi partisipasi politik. Dalam dinamika kelompok tersebut mulai muncul figur-figur mahasiswa perempuan yang berperan sebagai penggerak dan pemimpin lokal (*local leader*), yang secara informal mampu mengorganisasi diskusi, memfasilitasi pertukaran gagasan, serta mendorong keterlibatan teman sebaya dalam aktivitas kewarganegaraan.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menunjukkan terciptanya kesadaran baru di kalangan mahasiswa perempuan mengenai pentingnya partisipasi politik yang bermakna, aman, dan berkelanjutan. Kesadaran tersebut tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam perubahan sikap, perilaku, dan terbentuknya jejaring sosial yang mendukung partisipasi perempuan dalam ruang publik. Kondisi ini menjadi fondasi awal menuju transformasi sosial yang lebih luas, di mana mahasiswa perempuan mulai memosisikan diri sebagai subjek aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan yang berperspektif keadilan gender.

4. DISKUSI

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan literasi politik, kesadaran partisipatif, dan perubahan perilaku mahasiswa perempuan dalam konteks keterlibatan mereka sebagai warga negara yang aktif. Temuan ini beririsan dengan kajian literatur Indonesia yang menegaskan bahwa literasi politik mahasiswa merupakan prasyarat penting dalam memperkuat kedudukan mereka sebagai aktor demokrasi (Kusnadi & Sunarso, 2019). Dalam studi tersebut, literasi politik dipandang bukan sekadar pengetahuan normatif tentang sistem politik, tetapi mencakup kemampuan analisis, argumentasi, dan partisipasi aktif dalam diskursus publik.

Penguatan partisipasi politik dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang memberi ruang bagi mahasiswa perempuan untuk terlibat secara reflektif dan dialogis. Pendekatan ini secara konseptual sejalan dengan temuan Ismail dan Wekke (2018) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan harus memadukan elemen pengetahuan, internalisasi nilai, dan praktik

langsung agar mampu mendorong perubahan sikap dan tindakan. Kegiatan diskusi kelompok, simulasi, dan praktik penyusunan pendapat yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian sangat penting dalam mentransformasikan mahasiswa dari status sebagai pendengar pasif menjadi peserta yang aktif.

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan literasi politik, kesadaran partisipatif, dan perubahan perilaku mahasiswa perempuan dalam konteks keterlibatan mereka sebagai warga negara yang aktif. Temuan ini beririsan dengan kajian literatur Indonesia yang menegaskan bahwa literasi politik mahasiswa merupakan prasyarat penting dalam memperkuat kedudukan mereka sebagai aktor demokrasi (Kusnadi & Sunarso, 2019). Dalam studi tersebut, literasi politik dipandang bukan sekadar pengetahuan normatif tentang sistem politik, tetapi mencakup kemampuan analisis, argumentasi, dan partisipasi aktif dalam diskursus publik.

Penguatan partisipasi politik dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang memberi ruang bagi mahasiswa perempuan untuk terlibat secara reflektif dan dialogis. Pendekatan ini secara konseptual sejalan dengan temuan Ismail dan Wekke (2018) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan harus memadukan elemen pengetahuan, internalisasi nilai, dan praktik langsung agar mampu mendorong perubahan sikap dan tindakan. Kegiatan diskusi kelompok, simulasi, dan praktik penyusunan pendapat yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian sangat penting dalam mentransformasikan mahasiswa dari status sebagai pendengar pasif menjadi peserta yang aktif.

Lebih jauh, hasil yang menunjukkan meningkatnya keberanian mahasiswa perempuan berbicara dalam forum dan menyampaikan pendapat menguatkan temuan Sulastri (2019), yang menjelaskan bahwa kesadaran politik mahasiswa perempuan cenderung terhambat oleh stereotip sosial dan persepsi budaya tentang peran gender. Dalam konteks ini, pendampingan yang diberikan pengabdian tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator bagi mahasiswa perempuan untuk membangun identitas kewarganegaraan yang lebih kuat serta mematahkan hambatan-hambatan sosial yang selama ini membatasi partisipasi mereka.

Temuan pengabdian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Nugroho dan Astuti (2021), yang menekankan pentingnya interaksi sosial, jaringan komunitas, dan modal sosial (*social capital*) dalam memperluas ruang partisipasi politik kelompok perempuan di tingkat lokal. Pembentukan kelompok diskusi mahasiswa perempuan di lingkungan kampus dapat dipandang sebagai modal sosial baru yang membantu memperkuat ikatan

antarindividu, memperluas jejaring dukungan, serta mendorong keberlanjutan usaha-upaya partisipatif di luar kegiatan pengabdian. Keberadaan kelompok informal seperti ini selaras dengan gagasan bahwa perubahan sosial tidak hanya terjadi melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui struktur sosial yang dibangun secara horizontal melalui interaksi dan solidaritas (Putnam, 2000 dalam konteks literatur Indonesia).

Selain itu, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa integrasi antara proses akademik dan pengalaman sosial dapat menghasilkan pembelajaran transformatif yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga memengaruhi sikap dan tindakan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan temuan Sari dan Hidayat (2020), yang menyoroti bahwa pengabdian masyarakat berbasis kampus dapat berperan sebagai wahana pelibatan mahasiswa dalam problematika sosial nyata, sehingga pengalaman akademik tidak terlepas dari konteks keseharian mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, pengalaman partisipatif yang diberikan mahasiswa perempuan membuka ruang bagi pembentukan kapabilitas sosial-politik yang lebih kuat serta kesiapan bertindak sebagai agen perubahan di komunitasnya.

Secara keseluruhan, diskusi temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan literasi politik dan kesadaran partisipatif mahasiswa perempuan bukanlah proses linier yang terjadi hanya karena adanya eksposur pengetahuan semata, tetapi merupakan hasil dari keterlibatan aktif dalam lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi refleksi, dialog, dan praktik sosial. Interaksi tersebut berkontribusi pada perubahan perilaku, tumbuhnya rasa percaya diri, pembentukan modal sosial, dan terbukanya ruang peran bagi mahasiswa perempuan dalam wacana politik yang lebih luas.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada penguatan literasi dan kesadaran partisipasi politik mahasiswa perempuan menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan politik perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan regulasi atau kesempatan formal, melainkan oleh rendahnya literasi politik, kepercayaan diri, serta kuatnya internalisasi nilai-nilai kultural yang membatasi perempuan di ruang publik. Melalui pendekatan pengorganisasian komunitas dan *Participatory Action Research* (PAR), pengabdian ini berhasil mendorong proses pembelajaran kritis yang memungkinkan mahasiswa perempuan memahami politik sebagai ruang kewarganegaraan yang rasional, etis, dan aman. Secara teoretis, temuan pengabdian ini menegaskan relevansi teori partisipasi politik yang menempatkan orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif sebagai prasyarat utama

keterlibatan warga negara dalam demokrasi. Transformasi mahasiswa perempuan dari sikap pasif menuju kesadaran kritis dan kesiapan berpartisipasi menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang bersifat partisipatif mampu menggeser paradigma partisipasi politik dari sekadar aktivitas elektoral menuju partisipasi yang lebih substantif. Selain itu, temuan ini memperkuat perspektif feminisme politik yang menekankan pentingnya ruang aman dan pembelajaran kolektif dalam mengatasi hambatan struktural dan kultural terhadap partisipasi perempuan. Pada tataran praktis, pengabdian ini menghasilkan perubahan nyata berupa peningkatan kepercayaan diri mahasiswa perempuan, tumbuhnya kesadaran kolektif, serta terbentuknya kelompok diskusi sebagai pranata sosial baru di lingkungan kampus. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar perguruan tinggi secara aktif mengintegrasikan penguatan literasi politik perempuan ke dalam kurikulum, khususnya melalui mata kuliah kewarganegaraan, politik, dan kepemimpinan. Selain itu, kampus perlu menyediakan dukungan kelembagaan berupa ruang diskusi yang aman, program pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi dengan organisasi mahasiswa dan lembaga eksternal untuk memperluas praktik partisipasi politik yang inklusif. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran mahasiswa perempuan sebagai agen perubahan sekaligus berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang lebih adil dan berkeadilan gender di lingkungan kampus dan masyarakat luas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan sivitas akademika Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong atas dukungan kelembagaan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mahasiswa perempuan yang telah berpartisipasi aktif sebagai subjek dampingan sekaligus mitra dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Apresiasi turut diberikan kepada tim pelaksana, dosen pendamping, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program pengabdian ini. Semoga kerja sama yang terjalin dapat menjadi dasar bagi pengembangan kegiatan pengabdian yang berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Almond, G. A., & Verba, S. (2006). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik* (1st ed.). Prenada Media Kencana.
- Gabriel A. Almond. (2006). Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik. In M. M. dan C. MacAndrews (Ed.), *Perbandingan Sistem Politik* (Ketujuhbel, pp. 33–51).
- Ismail, M., & Wekke, I. S. (2018). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan kritis. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.1-20>
- Kiftiyah, A. (2019). PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 10–25.
- Kusnadi, D., & Sunarso. (2019). Literasi politik mahasiswa dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 87–97. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/10023>
- Kusnadi, D., & Sunarso. (2019). Literasi politik mahasiswa dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 87–97.
- Nugroho, R., & Astuti, P. (2021). Partisipasi politik perempuan dalam demokrasi lokal Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2.21543>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Sari, M. D., & Hidayat, A. (2020). Pengabdian masyarakat berbasis kampus untuk penguatan kesadaran kewarganegaraan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 23–34. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpmsi/article/view/32321>
- Sulastri, E. (2019). Kesadaran politik mahasiswa perempuan dalam konteks demokrasi Indonesia. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 6(2), 89–104. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/musawa/article/view/1256>
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). *Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik : Sebuah Kajian Teoritis*. 4.